

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi audit teknik dan finansial pada proyek konstruksi sebagai berikut:

1. Identifikasi faktor- yang mempengaruhi audit teknik dan finansial pada proyek konstruksi mendapatkan 26 (dua puluh enam) indikator berdasarkan dari kajian toeri, jurnal-jurnal terdahulu dan wawancara kepada pelaku-pelaku kegiatan tersebut.
2. Dari hasil penelitian diperoleh faktor-faktor dominan yang mempengaruhi diantaranya faktor administrasi kontrak berupa kelengkapan hasil uji dan dokumen pelaksanaan pekerjaan proyek merupakan faktor teratas. Selanjutnya faktor kualitas hasil audit berupa keahlian kecakapan dalam mengaudit. Berikutnya faktor sumber daya manusia berupa pengalaman kerja tim pemeriksa, dan faktor sumber daya manusia berupa indepedensi tim pemeriksa proyek. Faktor terakhir adalah administrasi kontrak berupa adanya perubahan pekerjaan (*variation order*) dalam pelaksanaan proyek.
3. Kolaborasi antara hasil perhitungan RII dan pembahasan studi kasus sampel pekerjaan proyek terkait faktor dominan yang mempengaruhi audit teknik dan finansial pada proyek konstruksi menghasilkan 2 (dua) faktor yang sering mempengaruhi dan terjadi di lapangan, diantaranya adalah

adanya perubahan pekerjaan (*variation order*) pada proyek dan kelengkapan dokumen dan hasil uji laboratorium yang seringkali belum terpenuhi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim PPHP.

4. Rekomendasi dari faktor-faktor dominan yang mempengaruhi audit teknik dan finansial adalah sebagai berikut:
  - a) Pihak rekanan tidak hanya fokus kepada pekerjaan fisik proyek semata, melainkan juga menyiapkan beberapa hal diantaranya kelengkapan administrasi berupa laporan pekerjaan, dokumentasi foto dari 0% sampai dengan 100%, menyertakan semua hasil uji laboratorium terkait beberapa item pekerjaan yang diujikan. Kesesuaian gambar/hasil pekerjaan di lapangan dengan perhitungan volume pekerjaan juga perlu diperhatikan, agar tidak terjadi perbedaan.
  - b) Untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, diperlukan sikap integritas yang tinggi, analisis yang cermat sehingga apabila terdapat kendala di lapangan yang harus diputuskan secara cepat, bisa ditindaklanjuti dengan segera berdasarkan aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c) Dengan jumlah tenaga teknik yang terbatas di pemerintah daerah, maka personil tersebut dituntut untuk dapat bekerja secara maksimal, sehingga perlu banyak pelatihan dan pendidikan terkait peraturan-peraturan yang berisi tentang pengadaan barang jasa, untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia. Dan juga dalam kegiatan pemeriksaan suatu pekerjaan konstruksi, setiap

personil membutuhkan jam terbang yang tinggi dan sering dilibatkan dalam kegiatan. Sehingga dapat menambah pengalaman dan juga mengasah kemampuan dalam melaksanakan tugas.

- d) Independensi sangat penting dimiliki oleh stakeholder suatu pekerjaan proyek khususnya PPHP dan PPK karena pengaruhnya besar terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Apabila terdapat hal yang menyalahi aturan maka perlu adanya sikap tegas untuk dapat memutuskan suatu masalah dengan tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku . Sehingga tidak ada unsur KKN dalam pelaksanaan pekerjaan dengan pihak rekanan atau yang lainnya.
- e) Apabila terdapat perubahan pekerjaan yang terjadi selama berlangsungnya kegiatan pekerjaan proyek tersebut, dari tim PPHP menyarankan untuk segera dibuatkan berita acara secara resmi terkait apa saja item pekerjaan yang mengalami perubahan baik tambah atau kurang. Dan perlu adanya kajian teknis lebih mendalam apabila dalam perubahan tersebut sangatlah penting. Sehingga dapat bermanfaat dan berguna dikemudian hari/ pada saat pemeriksaan sebagai dasar/acuan atas perubahan pekerjaan yang mana dapat dipertanggungjawabkan.
- f) Dalam pemeriksaan yang dilakukan PPHP, tidak hanya mengecek kelengkapan dokumen pada saat pelaksanaan tetapi juga mengecek dokumen dari mulai ded, perencanaan, dan tender. Kelengkapan dokumen berupa foto atau video yang sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan mulai dari nol sampai akhir pekerjaan. Terkait hasil uji

laboratorium harus ada laporan yang detail barang apa yang akan di tes, siapa yang membawa, laporan hasil laboratorium harus jelas. Sehingga hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

- g) Pemeriksaan pekerjaan oleh PPHP harus diperkuat dari pemeriksaan yang dilakukan pengawas/konsultan pengawas baik dari kualitas ataupun kuantitas sesuai dengan bukti pelaksanaan di lapangan, sehingga keputusan dari PPHP memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Dari hasil penelitian dan studi kasus yang dilakukan dengan wawancara mendalam, faktor dominan yang sering terjadi pada saat pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PPHP diantaranya terkait perubahan pekerjaan (variation order) dan kelengkapan administrasi proyek dari ded, perencanaan, lelang, kontrak sampai hasil laporan akhir pekerjaan proyek. Kedua hal tersebut dapat dijadikan acuan/perhatian dari pemerintah daerah terutama pengelola kegiatan (PA/KPA, PPK, PPTK, P3K, PPHP) dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. Pengelola kegiatan juga harus lebih cermat, hati-hati, dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan dengan masih tetap memperhatikan faktor dominan lainnya.

2. Dalam menunjang kinerja PPHP dibutuhkan peran dari pengawas/konsultan pengawas secara maksimal sehingga kualitas dari pemeriksaan teknik dan finansial akan menjadi baik.
3. Dalam audit finansial, PPHP hanya memeriksa dan menerima baik kualitas atau kuantitas yang sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya berita acara tersebut dapat dijadikan acuan rekanan dalam mengajukan pencairan. Maka diperlukan PPTK dengan kinerja yang baik dan teliti.
4. Perlunya integritas tinggi dan komitmen yang jelas dari semua pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan proyek konstruksi.
5. Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan koordinasi dalam bekerja dalam hal ini terutama dari pengelola kegiatan.
6. Perlu membuat suatu sistem database yang mewajibkan rekanan mengisi form checklist online semua berkas dari kontrak sampai pemeriksaan, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh PPHP. Database tersebut dapat juga berfungsi sebagai arsip untuk instansi karena selama ini belum ada berkas yang disimpan dalam data, hanya sebatas hardcopy yang disimpan di gudang.
7. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait peran PPHP dengan sudut pandang kinerja ataupun prosesnya terkait pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan PPHP dalam suatu pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi yang juga disesuaikan dengan aturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya .



## DAFTAR PUSTAKA

- Arens & Loebbecke (2011). Auditing, An Integrated approach. Seventh Edition Upper Saddle River. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Boynton et al. (2001). Modern Auditing. Edisi Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Dimiyati, H.A. & Nurjaman, K. (2014), Manajemen Proyek. Bandung :Financial Times / Prentice Hall.
- Ervianto, W. (2005), Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi revisi). Andi, Jogjakarta.
- Hamid, K. A. (2015), *Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan Wilayah Barat*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Hampton, D. (1990), Consulting Engineer's of Governmental Overhead and Audits. *Journal of Management in Engineering*, 6, 145-151.
- Handajani, L., Alamsyah, (2017). Determinan Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Pemerintah Daerah.
- Hardjomuljadi, S.(2009), Strategi Pra Kontrak Untuk Mengurangi Dampak Klaim Konstruksi Pada Proyek Pusat Listrik Tenaga Air Di Indonesia. Disertasi, Universitas Tarumanegara.
- Hardjomuljadi, S. (2016). *Variation Order The Causal Or The Resolver Of Claim and Dispute In The Construction Project*. International Journal ISSN 0973-4562 Volume 11, number 14.
- Hariyanto, A. (2012). Analisis Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Rendahnya Penerapan Kode Etik Profesi Insinyur Pada Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD dr. SOEROTO Kabupaten Ngawi.
- Heizer, J. dan Barry R. (2009), Manajemen Operasi. Jakarta:Salemba Empat.
- Hermiaty, D. (2007), *Pemodelan dan Analisis Proporsi Upah Tenaga Kerja pada Proyek Konstruksi*, Tesis Magister Manajemen Konstruksi, UII.
- Husein, A. (2009), Manajemen Proyek. Edisi Revisi. Andi : Jogjakarta. *in Engineering*, 13, 40-45.

- Jain, R.K. (1997), Metrics of Organization Effectiveness. *Journal of Management in Engineering*, 13, 40-45.
- Mahendra, S.S. (2004). *Manajemen Proyek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Messier, W.E., Steven M.G., dan Douglas F.P.. (2005), *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Sistematis*, Buku 2, Edisi 4, Terjemahan oleh Nuri Hinduan, Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nokes. (2007). *The Definitive Guide to Project Management* (2nd ed.). Financial Times / Prentice Hall, London.
- Nugroho S., W., (2015). Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Pemahaman *Good Governance* Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah.
- Nurhayati. (2010). *Manajemen Proyek*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Parasayu, A., A., Rohman, A. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Audit Internal (Studi Persepsi Aparat Intern Pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2007, tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pusat Bahasa (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Raditya, S. S., (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ranny A., (2010). Studi Faktor-faktor Penentu Kesuksesan Penutupan Proyek Konstruksi Gedung Swasta Di Jakarta dan sekitarnya.
- Redwan Jaafar & John Elim, (2008). Kode Etik dan Standar Audit. Edisi Kelima. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Riduan (2006) Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan, (2010). "Metode dan Teknik Menyusun Tesis Bandung: Alfabeta.
- Santoso, R. (2004), Tingkat Kepentingan dan Alokasi Risiko pada Proyek Konstruksi.
- Sawyer L. (2005). Audit Internal Sawyer. Edisi Kelima. Terjemahan Desi Andhariyani. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Siregar, S.R. (2012). Faktor yang mempengaruhi pertimbangan opini auditor atas laporan keuangan Pemda Yogyakarta. Jurnal Analisis Akuntansi, UNNES.
- Soeharto, I. (1995). *Manajemen Proyek Dari Tahap Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Soeharto, I. (1999), *Manajemen Proyek (dari Konseptual sampai Operasional)*. Jakarta: Erlangga
- Sugiarto. (2001). Teknik Sampling. Jakarta : PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006), Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2002). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukrisno, A. (2004), Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Sutaryono, D. (2013). Pengawasan Inspektorat Wilayah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Kutai Timur.

Tugiman, H. (1995). Standar Profesi Internal Audit. Bandung: Hiro Tugiman.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Winarna J. dan Mabruri H., (2015). Analisis Faktor--Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.